

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam keseluruhan proses produksi, sesuai yang ada dalam UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan menurut Mulyadi (dalam Nita Sokhifatul Awalia, 2014: 104) yang dikatakan tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja, dan jika mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Menurut Payaman J. Simanjuntak (dalam Lalu Husni, 2012: 27) tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Sedangkan bukan tenaga kerja adalah penduduk yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja hanya dibedakan oleh mau atau tidak maunya penduduk untuk bekerja, meskipun telah sama-sama memiliki kesempatan kerja.

Seseorang individu dapat dikatakan tenaga kerja adalah individu yang berada pada usia kerja. Biro Pusat Statistik Indonesia menetapkan penduduk usia kerja adalah mereka yang berada pada umur 15-64 tahun. Jadi, penduduk yang berada dibawah 15 tahun tidak dikatakan usia kerja karena pada usia tersebut adalah usia sekolah. Sedangkan penduduk diatas 64 tahun memiliki kecenderungan ketidakmampuan penduduk untuk bekerja efektif karena dapat dikatakan sudah tua.

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah individu dalam usia kerja yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup.

1. Klasifikasi Tenaga Kerja

Klasifikasi memiliki pengertian penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang ditentukan. Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan tenaga kerja yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu:

a. Berdasarkan penduduk

1) Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja, yaitu mereka yang berusia di antara 15 sampai 64 tahun.

2) Bukan tenaga kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia kerja, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun (anak-anak wajib sekolah) dan berusia di atas 64 tahun (pensiunan atau usia lanjut).

b. Berdasarkan batas kerja

1) Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia antara 15 – 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

2) Bukan angkatan kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berusia 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga

dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah anak sekolah, ibu rumah tangga, orang cacat, dan para pengangguran sukarela.

c. Berdasarkan kualitas

1) Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara bersekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, guru, dokter, dan lain-lain.

2) Tenaga kerja terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terlatih ini membutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja dalam bekerja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

2. Masalah Ketenagakerjaan

Salah satu masalah mendasar yang masih dihadapi Indonesia sepanjang perjalanannya menjadi negara yang merdeka adalah masalah pengangguran, dimana pemerintah dengan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran. Upaya yang ditempuh pemerintah dalam persoalan pengangguran dari waktu ke waktu ditempuh melalui berbagai pendekatan pembangunan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (*production contered development*). Namun pada kenyataannya masalah ketenagakerjaan di Indonesia masih banyak yang belum bisa diatasi oleh pemerintah.

Permasalahan yang timbul dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan lapangan pekerjaan
- b. Peningkatan mutu dan kemampuan kerja
- c. Penyebaran tenaga kerja
- d. Perlindungan tenaga kerja

B. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Menurut BNP2TKI, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga professional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu yang tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Di Indonesia dikenal adanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yaitu sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Faktor yang mendorong warga Indonesia bekerja di luar negeri adalah faktor ekonomi. Hal ini dikarenakan tidak adanya akses untuk mendapatkan peluang-peluang kerja di daerah asal.

Tabel 2.1

Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Tahun 2011 s/d 2015 (s.d 31 Desember)

No	Tahun	Jumlah TKI yg dilayani	TKI Formal	%	TKI Informal	%
1	2011	586.802	266.191	45	320.611	55
2	2012	494.609	258.411	52	236.198	48
3	2013	512.168	285.297	56	226.871	44
4	2014	429.872	247.610	58	182.262	42
5	2015 (S.D 31 Desember)	275.736	152.394	55	123.342	45

Sumber data: BNP2TKI Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi

Berdasarkan data pada tabel 2.1 menunjukkan bahwa jumlah TKI yang bekerja di luar negeri mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2014 jumlah TKI yang bekerja mengalami peningkatan 2% untuk TKI formal dan TKI informal mengalami penurunan 2%. Namun, pada tahun 2015 TKI formal mengalami penurunan sebanyak 3% dan TKI informal mengalami peningkatan 3%. Penurunan TKI formal dikarenakan persyaratan untuk menjadi TKI formal dan harus menunggu panggilan kerja, sedangkan pekerjaan dibutuhkan secepat mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup dari para tenaga kerja dan keluarga tenaga kerja.

1. Tujuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Menjadi pekerja di negara lain bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan karena akan jauh dari keluarga. Namun alasan kuat mereka untuk menjadi TKI di luar negeri adalah:

- a. Sebagian dari mereka adalah tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan, sedangkan di Negara sendiri tidak mau menerima orang yang tidak memiliki keahlian khusus.
- b. Himpitan ekonomi keluarga.
- c. Terlilit hutang.
- d. Kecemburuan sosial yaitu, iri terhadap tetangga yang sukses menjadi TKI.
- e. Sulitnya mencari pekerja di Indonesia dengan penghasilan yang layak

Menurut BNP2TKI tujuan dari TKI bekerja ke luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan lapangan kerja;
- b. Peningkatan kualitas tenaga kerja;
- c. Peningkatan perlindungan tenaga kerja;
- d. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja; dan
- e. Peningkatan penerimaan devisa negara.

Berdasarkan tujuan di atas, jelas bahwa tujuan seseorang memilih untuk bekerja di negara lain adalah untuk meningkatkan kualitas hidup baik sosial maupun ekonomi.

2. Macam-macam Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

a. Tenaga kerja legal (Departemen Tenaga Kerja)

TKI yang bekerja di luar negeri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu TKI legal dan TKI ilegal. TKI legal adalah tenaga kerja Indonesia yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme secara hukum yang harus ditempuh untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri, para pekerja juga harus disertai dengan surat-surat resmi yang menyatakan izin bekerja di luar negeri. TKI legal akan mendapatkan perlindungan hukum, baik itu dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah negara tujuan. Oleh karena itu para TKI ini juga harus melengkapi persyaratan legal yang diajukan oleh pihak imigrasi negara penerima.

TKI legal selanjutnya akan terdaftar di instansi pemerinatahan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan terdaftar di instansi terkait sebagai tenaga kerja asing di negara penerima. Para TKI legal juga memiliki perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pihak terkait, berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan TKI legal diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan perlindungan hukum.

b. Tenaga kerja ilegal

TKI ilegal adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri namun tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di tempat tersebut. Para TKI ilegal tidak mengikuti prosedur dan mekanisme hukum yang ada di Indonesia dan negara penerima. Empat kategori pekerja asing dianggap ilegal, yaitu: Mereka yang bekerja di luar masa resmi mereka tinggal, Mereka yang bekerja di luar ruang lingkup aktivitas diizinkan untuk status mereka, Mereka yang bekerja tanpa status kependudukan yang izin kerja atau tanpa izin dan Orang-orang yang memasuki negara

tersebut secara tidak sah untuk tujuan terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau bisnis.

3. Faktor Pendorong dan Penarik Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Tujuan utama menjadi TKI di luar negeri untuk meningkatkan taraf hidup TKI dan keluarganya, baik dari segi ekonomi maupun sosial, sehingga umumnya mereka mencari pekerjaan yang dapat memberikan pendapatan dan status sosial lebih baik di negara tujuan. Sebuah keinginan tersebut tentu memiliki faktor pendorong dan penarik, dimana faktor pendorong adalah wilayah asal dan faktor penarik adalah wilayah tujuan. Faktor pendorong wilayah menyebabkan seseorang pergi ke wilayah lain adalah tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai di wilayah tersebut. Sedangkan faktor penarik adalah jika suatu wilayah mampu menyediakan fasilitas dan sumber-sumber penghidupan bagi penduduk, sehingga menarik minat seseorang untuk datang ke wilayah tersebut karena dianggap dapat menyediakan lapangan pekerjaan layak.

a. Faktor pendorong

- 1) Menyempitnya lapangan pekerjaan di negara/wilayah asal
- 2) Adanya tekanan-tekanan seperti politik, suku, dan agama sehingga mengganggu hak asasi penduduk di negara/wilayah asal
- 3) Alasan pendidikan, pekerjaan, atau perkawinan
- 4) Bencana alam, seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, kemarau panjang, atau adanya wabah penyakit
- 5) Semakin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya mungkin susah diperoleh, seperti hasil tambang, kayu, atau bahan dari pertanian.

b. Faktor penarik

- 1) Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup
- 2) Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik

- 3) Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas lainnya
- 4) Adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang negara lain untuk bermukim di negara lain.

4. Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri

Tabel 2.2

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Jenis Masalah
Periode (1 Januari s.d 31 Desember) 2015

No	Jenis Masalah	Jumlah	No	Jenis Masalah	Jumlah
1	Meninggal	680	14	TKI tidak berdokumen	81
2	TKI gagal berangkat	658	15	Perdagangan orang	54
3	TKI ingin dipulangkan	524	16	TKI dalam tahanan	46
4	Gaji tidak dibayar	488	17	Pemalsuan dokumen	43
5	Putus hubungan komunikasi	287	18	Penahanan paspor	39
6	Overstay	279	19	Melarikan diri dari rumah majikan	38
7	TKI sakit/rawat inap	244	20	Sakit	38
8	Tidak dipulangkan meski kontrak telah selesai	177	21	Ilegal rekrut calon TKI	37
9	Pekerjaan tidak sesuai PK	171	22	Penipuan peluang kerja	36
10	Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir	167	23	Gaji dibawah standar	34
11	TKI tidak punya ongkos pulang	132	24	Potongan gaji melebihi ketentuan	34
12	Tindak kekerasan majikan	104	25	Pemalsuan sertifikat kesehatan	34
13	TKI mengalami kecelakaan	95	26	lainnya	374
TOTAL					4.894

Sumber: BNP2TKI 2015

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, bahwa pengaduan TKI di luar negeri sebanyak 4.894. permasalahan yang paling banyak adalah kasus TKI yang meninggal di daerah tujuan, gagalnya TKI berangkat ke negara tujuan, TKI yang ingin di pulangkan ke negara asal, dan lain sebagainya. Bentuk

pengaduan dari para TKI berupa pengaduan secara langsung, melalui surat, Email, SMS, Telepon, dan lain-lain. Negara yang memiliki pengaduan terbanyak adalah Negara Malaysia dengan total 1.994 pengaduan, Saudi Arabia dengan total 1.103 pengaduan, Taiwan 274 pengaduan, United Arab Emirates 264 pengaduan, di ikuti negara Oman, Singapore, Bahrain, Hong Kong, dan lain-lain.

C. Remitansi

Migrasi bukanlah suatu fenomena baru bagi penduduk Indonesia karena itu adalah sebuah tindakan utama untuk memerangi kemiskinan dan sebagian besar dampak langsung dari kegiatan migrasi adalah pengiriman uang atau yang lebih sering disebut remitansi. Remitansi menurut Connel et.al (dalam Dahlia Triyanti dkk, 2013: 2) adalah uang atau barang yang dikirim oleh tenaga kerja ke daerah asal, sementara tenaga kerja masih berada di tempat tujuan. Namun definisi ini mengalami perluasan, tidak hanya uang, barang, tetapi keterampilan dan ide-ide baru yang juga digolongkan sebagai remitan bagi daerah asal. Keterampilan dan ide-ide baru tersebut sangat bermanfaat bagi daerah asal karena akan membantu dalam peningkatan kualitas pembangunan desa baik itu cara-cara kerja, membangun rumah dan hidup yang sehat, serta peningkatan kualitas lingkungan.

Remitansi menurut Curson (dalam Dahlia Triyanti dkk, 2012: 2) merupakan pengiriman uang, barang, ide-ide pembangunan dari perkotaan ke pedesaan dan merupakan instrumen penting dalam kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat. Dari kedua penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa remitansi merupakan suatu pengiriman uang, barang atau ide-ide dari tenaga kerja kepada para keluarga yang berada di daerah asal dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Proses pengiriman remitan secara umum dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Pengiriman langsung; pengiriman remitan yang dilakukan oleh para TKI langsung ke negara asalnya yang berbentuk uang dan ada juga yang bukan

dalam bentuk barang atau uang, namun berupa gagasan atau ide yang diperoleh oleh para migran untuk kemudian diterapkan di daerah asalnya. Pengiriman langsung ini dapat diinformasikan melalui telepon atau lewat pengiriman surat langsung ke penerima manfaat.

2. Pengiriman melalui pihak lain; pengiriman yang dilakukan dengan bantuan pihak lain biasanya berupa barang atau uang. Para migran dapat memanfaatkan agen-agen pengiriman remitan yang ada di negara mereka bekerja untuk mengirimkan remitan ke keluarganya di negara asal. Dengan adanya kemajuan teknologi para migran ini bisa menghubungi pihak agen pengiriman remitansi dengan *via* internet, kemudian pihak agen pengiriman remitan di negara migran bekerja akan melakukan transaksi dengan pihak agen penerima remitan di negara asal migran, yang pada akhirnya akan disalurkan ke keluarga para migran di negara asal.

D. Kondisi Sosial ekonomi

Apabila dilihat dari arti kata kehidupan sebenarnya adalah cara atau keadaan tentang hidup, dan arti kata sosial adalah sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, sedangkan arti kata ekonomi adalah ilmu mengenai azas-azas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti hal keuangan, perindustrian dan perdagangan. Maka kondisi sosial ekonomi adalah perilaku sosial masyarakat yang menyangkut interaksi dan perilaku ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan dan pemanfaatannya.

Menurut Soerjono Soekanto (dalam Galuh Apriyanti, 2015: 14) sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya. Sedangkan menurut Koentjaraningrat (2001) kondisi sosial ekonomi juga merupakan suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan merupakan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat, pemberian posisi ini disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembawa status.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan pengertian kondisi sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban. Kedudukan seseorang dalam masyarakat akan diperoleh berdasarkan 5 faktor, yaitu tingkat pendidikan, pendapatan, jenis pekerjaan, kepemilikan kekayaan, dan jenis tempat tinggal.

1. Tingkat Pendidikan

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI Pasal 14-19, jenjang pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan paling dasar di Indonesia yang mendasari pendidikan menengah anak usia 7-15 tahun diwajibkan mengikuti pendidikan dasar. Bentuk pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar (SD/MI) dan SMP/MTs.

b. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah diselenggarakan selama 3 tahun dan terdiri atas Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki

kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian.

Jenjang pendidikan tersebut adalah jenjang pendidikan yang secara resmi dan diwajibkan oleh peserta didik dalam jalur pendidikan formal, tetapi ada tahap pendidikan yang tidak diwajibkan dilaksanakan yaitu pendidikan anak usia dini sebelum mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini antara lain adalah Taman Kanak-kanak (TK) dan *Raudatful Atfal* (RA) yang berada di bawah naungan Departemen Agama.

2. Pekerjaan

Pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi seseorang karena dari bekerja segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. Pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi namun usaha manusia untuk mendapatkan kepuasan dan mendapatkan imbalan atau upah, berupa barang dan jasa akan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kemampuan ekonominya, untuk itu bekerja merupakan suatu keharusan bagi setiap individu sebab dalam bekerja mengandung dua arti, yaitu kepuasan jasmani dan terpuhinya kebutuhan hidup. Dalam masyarakat tumbuh kecenderungan bahwa orang yang bekerja akan lebih terhormat di mata masyarakat, artinya lebih dihargai secara sosial dan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, untuk menentukan status sosial ekonomi yang dilihat dari pekerjaan, maka jenis pekerjaan dapat diberi batasan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang berstatus tinggi, yaitu tenaga ahli teknik dan ahli jenis, pemimpin ketatalaksanaan dalam suatu instansi baik pemerintah maupun swasta, tenaga administrasi tata usaha.
- b. Pekerjaan berstatus sedang, yaitu pekerjaan dibidang penjualan dan jasa.
- c. Pekerjaan berstatus rendah, yaitu petani dan operator alat angkut/bengkel.

3. Pendapatan

Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja. Pendapatan menurut ilmu ekonomi

diartikan sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode seperti keadaan semula. Definisi tersebut menitikberatkan pada total kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Dengan kata lain pendapatan merupakan jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Secara garis besar pendapatan didefinisikan sebagai jumlah harta kekayaan awal periode ditambah perubahan penilaian yang bukan diakibatkan perubahan modal dan hutang, Zulriski (dalam Pitma Pertiwi, 2015: 22).

Pendapatan adalah keseluruhan penghasilan yang diterima baik dari sektor formal maupun nonformal yang dihitung dalam jangka waktu tertentu. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur pendapatan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, oleh karena itu BPS melakukan perhitungan pendapatan dengan menggunakan pengeluaran atau konsumsi masyarakat. Hal ini didasari oleh paradigma bahwa bila pendapatan mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh berbagai kebutuhan yang semakin banyak sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi pula.

Kesimpulan dari pendapat di atas adalah pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima seseorang berupa uang atau barang dari bekerja dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan penggolongannya, Badan Pusat Statistik (BPS) membedakan pendapatan penduduk menjadi 4 golongan, yaitu:

- a. Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000,00 per bulan
- b. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 2.500.000,00 s/d Rp. 3.500.000,00 per bulan
- c. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata dibawah antara Rp. 1.500.000,00 s/d Rp. 2.500.000,00 per bulan
- d. Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata Rp. 1.500.000,00 per bulan.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dikatakan bahwa pendapatan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat ekonomi seseorang. Apabila seseorang mempunyai pendapatan yang tinggi, maka dapat dikatakan bahwa tingkat ekonominya tinggi.

Pada hakikatnya pendapatan yang diperoleh seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat pendidikan dan pengalaman seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman, maka semakin tinggi pula tingkat pendapatannya. Kemudian tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, jenis barang dagangan (produk) dan faktor lainnya. Pada umumnya masyarakat selalu mencari tingkat pendapatan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi dibatasi oleh beberapa faktor tersebut, Nazir (dalam Pitma Pertiwi, 2015: 23).

Menurut Sukirno (dalam Pitma Pertiwi, 2015: 25) faktor yang mempengaruhi perbedaan upah, yaitu:

a. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam suatu jenis pekerjaan sangat besar peranannya dalam menentukan upah di suatu jenis pekerjaan. Di dalam suatu pekerjaan dimana terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaannya, upah cenderung rendah. Sebaliknya di dalam suatu pekerjaan dimana terdapat penawaran tenaga kerja yang terbatas tetapi permintaannya sangat besar dan upah cenderung tinggi.

b. Perbedaan corak pekerjaan

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. ada diantara pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan ringan dan sangat mudah dikerjakan. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga fisik yang besar, dan ada pula pekerjaan yang harus dilakukan dalam lingkungan yang kurang menyenangkan.

c. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan

Kemampuan, keahlian dan keterampilan tenaga kerja di dalam suatu jenis pekerjaan adalah berbeda. Jika hal tersebut lebih tinggi maka produktivitas akan lebih tinggi, upah yang didapat juga akan semakin tinggi. Tenaga kerja yang berpendidikan akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikan mempertinggi kemampuan kerja dan kemampuan pekerja menaikkan produktivitas.

d. Pertimbangan bukan uang

Daya tarik suatu pekerjaan bukan saja tergantung kepada besarnya upah yang ditawarkan. Ada tidaknya perumahan yang tersedia, jauh dekatnya rumah pekerja, apakah berada di kota besar atau di daerah terpencil, dan pertimbangan lainnya. Faktor-faktor bukan uang seperti ini akan mempunyai peranan yang cukup penting pada waktu seseorang memilih pekerjaan. Seseorang sering kali menerima upah yang rendah apabila pertimbangan bukan keuangan sesuai dengan keinginannya.

e. Mobilitas pekerja

Upah dari suatu pekerjaan di berbagai wilayah dan bahkan di dalam suatu wilayah tidak selalu sama. Salah satu faktor yang menimbulkan perbedaan tersebut adalah ketidaksempurnaan mobilitas pekerja disebabkan oleh faktor geografis dan institusional.

4. Pemilikan

Selain Pendidikan, pekerjaan dan pendapatan, yang menjadi ukuran status ekonomi seseorang adalah pemilikan. Pemilikan barang-barang yang berharga dapat digunakan untuk ukuran tersebut. Semakin banyak seseorang memiliki sesuatu yang berharga seperti rumah, tanah, dan perhiasan, maka dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut mempunyai kemampuan ekonomi yang tinggi dan mereka semakin dihormati oleh orang-orang disekitarnya.

Apabila seseorang memiliki tanah, rumah sendiri, sepeda motor, mobil, komputer, televisi dan tape biasanya mereka termasuk golongan orang mampu atau kaya. Apabila seseorang belum mempunyai rumah dan menempati rumah dinas, punya kendaraan, televisi, tape, mereka termasuk

golongan sedang. Namun apabila seseorang memiliki rumah kontrakan, sepeda dan radio biasanya termasuk golongan biasa.

5. Jenis Tempat Tinggal

Menurut Kaare Svalastoga (dalam Galuh Apriyanti, 2015: 21) untuk mengukur tingkat sosial ekonomi seseorang dari rumahnya, dapat dilihat dari:

- a. Status rumah yang ditempati, bias rumah sendiri, rumah dinas, menyewa, menumpang pada saudara atau ikut orang lain.
- b. Kondisi fisik bangunan, dapat berupa rumah permanen, kayu dan bamboo. Keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi, pada umumnya menempati rumah permanent, sedangkan keluarga yang keadaan sosial ekonominya menengah kebawah menggunakan semi permanen atau tidak permanen.
- c. Besarnya rumah yang ditempati, semakin luas rumah yang ditempati pada umumnya semakin tinggi tingkat sosial ekonominya. Rumah dapat mewujudkan suatu tingkat sosial ekonomi bagi keluarga yang menempati. Apabila rumah tersebut berbeda dalam hal ukuran kualitas rumah. Rumah yang dengan ukuran besar, permanen dan milik pribadi dapat menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya tinggi berbeda dengan rumah yang kecil, semi permanen dan menyewa menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya rendah.